

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah dalam menerapkan pemerintah yang baik menjadi tugas utama pemerintah. Pemerintah harus senantiasa dan mengerti akan lingkungannya serta selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik dengan melaksanakan semua tugas yang diamanatkan dan senantiasa bertanggung jawab terhadap pembagian tugas yang dipercayakan oleh penyelenggara negara. Pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur merupakan suatu upaya dimana pemerintah sebagai bentuk pelayanan dan tanggungjawab kepada publik, sehingga dalam melaksanakan kegiatan tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan dalam pengelolaannya. Setiap tahap pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan, dibutuhkan keterlibatan individu dalam tahap pelaksanaan kegiatan.

Organisasi sektor publik selalu dituntut agar memiliki kinerja yang ditujukan pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk tanggap terhadap lingkungan disekitarnya, dengan cara memberikan upaya pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, serta adanya pembagian tugas yang baik pada suatu struktur organisasi pemerintahan. Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial organisasi tersebut (Nengsy, 2017).

Kinerja sektor publik didasarkan pada kinerja manajer dan para aparatur pemerintah. Manajer dan para aparatur pemerintah sebagai pelaksana dari kegiatan

pemerintahan bertanggung jawab untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif dengan menginteraksikan kemampuan pimpinan dan kemampuan bawahan. (Fazira dan Erdawati, 2019). Menurut Akhyar (2009) dalam (Saputra, W. D., 2017) yang dimaksud dengan kinerja manajerial adalah kinerja individu anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan manajerial, antara lain: perencanaan, investigasi, koordinasi, supervise, pengaturan staff, negosiasi dan representasi. Ermawati (2017), Kinerja manajerial pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah daerah, yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur instansi tersebut.

Berkaitan dengan kinerja, maka salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kinerja manajerial pada organisasi sektor publik, dapat dilihat dari proses perencanaan, karena suatu perencanaan dapat menentukan keberhasilan suatu program kegiatan . Namun, kinerja tidak dapat dilihat dari input atau perencanaan program saja, tetapi lebih ditekankan kepada jalannya proses, output, manfaat, dan outcome dari program kegiatan tersebut bagi kesejahteraan masyarakat.(Wiratno et al., 2016)

Berkaitan dengan kinerja, khususnya dalam pemerintah desa sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintah desa, perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa. Kondisi ini Wahyudi

*et al.*, (2019), perangkat desa dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah desa yang senantiasa tanggap terhadap lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparansi, akuntabel, sehingga dapat merubah status desa dari yang tertinggal menjadi menjadi desa yang maju.

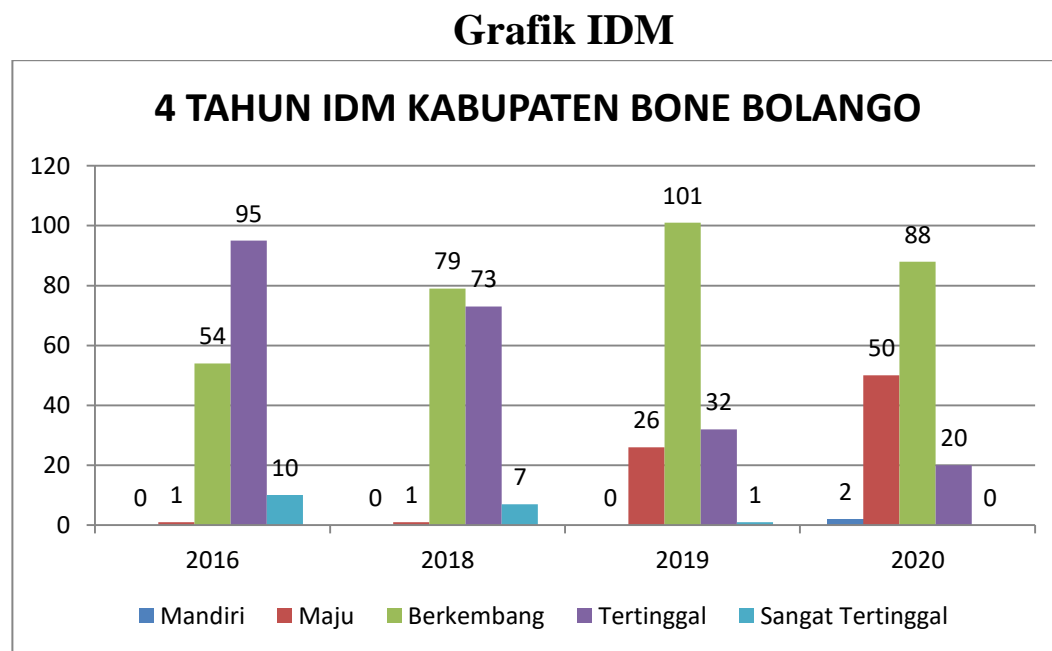
Menurut Arfah *et al* (2020), kinerja pemerintah desa merupakan tingkat capaian dari suatu hasil kerja, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan desanya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana desa untuk kepentingan masyarakat desa. Sedangkan menurut Siregar *et al* (2020), kinerja pemerintah desa adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok, dengan melalui usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif. Dina *et al* (2018) untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa yaitu salah satunya dengan melakukan pengelolaan keuangan desa secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak jauh berbeda dengan penelitian menurut Nyoman (2019), kinerja pemerintah desa yaitu untuk meningkatkan kinerja secara optimal serta mampu menciptakan tujuan masyarakat desa yang sejahtera serta mengedepankan akuntabilitas dan peningkatan pelayanan publik. Asmawati (2018), kinerja pemerintah desa yang baik dapat ditunjukkan dengan indikator akuntabilitas dan transparansi.

Pemerintah desa memperoleh dana yang dapat yang dapat dikelola relatif besar dan di sisi lain, tentunya dana yang relatif besar harus dapat dikelola dan dapat di pertanggungjawabkan dengan baik menurut (Kumalasari, 2016). Berdasarkan dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa dana desa yang diperoleh diharapkan agar dapat dikelola dengan baik sehingga lebih mensejahterakan masyarakat dan dapat merubah status desa, sebab menurut Liliana (2017), dengan perubahan status desa maka pelayanan kepada publik yang harus meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan antar pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam pembangunan, tidak terkecuali pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan data yang dihimpun dari website [gorontalo.antaranews.com](http://gorontalo.antaranews.com) bahwa Bone Bolango pada tahun 2016 mendapatkan dana desa sebesar 95,9 miliar. Pada tahun 2017 naik sebesar 122,3 miliar, pada tahun 2018 sebanyak 124 miliar, dan 2019 mencapai 869,93 miliar. Dengan melihat dana desa yang tiap tahun mengalami kenaikan, semestinya Kabupaten Bone Bolango lebih meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam hal membangun desa yang mandiri.

Berkaitan dengan status desa yang ada di Bone Bolango setelah memperoleh dana desa selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari indeks desa membangun. IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi

atau lingkungan. Dalam ketiga indeks ini merupakan dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berikut grafik IDM Kabupaten Bone Bolango.



**Sumber: Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa**

Grafik 1.1. menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa di Kabupaten Bone Bolango masih jauh dari yang diharapkan. Karena masih di temui data desa berkembang yang hanya mencapai 55% selama 4 tahun terakhir, dan terdapat 31,25% untuk desa yang maju, dan 2 desa yang berhasil mencapai status desa mandiri di tahun 2020.

Jika kita lihat dari implementasi pengelolaan keuangan desa dan pengalaman beberapa tahun ini, kita kita dapat mengidentifikasi dari beberapa kasus yang

dikategorikan sebagai kasus pelanggaran administrasi dan kecurangan (*fraud*) atau penyelewengan tindak pidana korupsi. Adapun pelanggaran administrasi dan penyelewengan tindak pidana korupsi dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan desa sekarang ini, seperti yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Bone Raya Desa Mootayu dan Desa Moopiya, dimana kepala desanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Kasus pembangunan sarana prasarana pembangunan mahyani di desa ilohuuwa Kecamatan Bone, yang tidak transparan sehingga menyebabkan progres pembangunan stagnan (belum selesai) dan pada akhirnya berdampak pada pencairan anggaran di tahun berikutnya. Pembangunan sarana olahraga yang terjadi di Desa Bunga Kecamatan Bone Raya tidak masuk dalam perencanaan desa dan tidak dibahas dalam dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) tetapi dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Adapun Permasalahan yang di Desa Talango Kecamatan kabila dan Desa Kamiri Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango bahwa partisipasi masyarakat untuk membantu dalam pelaksanaan pembangunan desa masih sangat kurang, baik dari segi moril maupun materil, karena masih terdapat sebagian masyarakat belum berpartisipasi dalam hal pembangunan desa, partisipasi yang di harapkan di disini yaitu berupa uang, pemikiran, dan tenaga. Tetapi dalam hal ini, sebagian masyarakat hanya mementingkan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan umum. Contoh kasus diatas menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi penyusunan anggaran. Kurangnya partisipasi anggaran akan mempengaruhi kemajuan suatu desa (Hasan *et al.*, 2021).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wiratno *et al.* (2017), Salain *et al.* (2018), Wiwaha I Gede, (2018), menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial. Berbeda dengan hasil penelitian Handrika *et al* (2017), bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh pada kinerja manajerial. Dan penelitian yang dilakukan Ermawati (2017) dan Fuadah (2019), yang membuktikan adanya hubungan negatif antara anggaran partisipatif dengan kinerja manajerial. Supriyono 2019 menunjukan bahwa partisipasi anggaran dan kinerja manajerial menunjukan bukti yang tidak meyakinkan dan seringkali bertentangan. Perdebatan tersebut menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian kembali.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja. Namun kinerja pada penelitian-penelitian tersebut adalah kinerja aparat pemerintah desa, seperti penelitian yang dilakukan oleh Arfah *et al.*, (2020) dan Siregar *et al.*, (2019). Sedangkan penelitian yang membahas tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dilakukan oleh Salain *et al* (2018) tentang kinerja manajerial yang dimoderasi oleh budaya paternalistik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan variabel bebas yang berbeda, serta penelitian ini dilakukan dengan lokasi penelitian yang berbeda.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diambil untuk melakukan penelitian kembali dengan objek yang berbeda, yaitu pada pemerintah desa di Kabupaten Bone Bolango. Dikarenakan dalam praktek-praktek pembuatan

keputusan penyusunan anggaran relatif sulit karena dipengaruhi oleh perbedaan perilaku dan cara kerja manajer. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial (Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Bone Bolango).**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah ini yaitu: Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Berkaitan dengan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan Akuntansi terutama Akuntansi Sektor Publik yang diarahkan pada partisipasi anggaran dan senjangan anggaran. Penelitian ini juga diharapkan untuk menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan judul partisipasi anggaran.



## 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat desa dalam rangka pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja. Selain itu, dapat memberikan kontribusi praktis untuk menerapkan sistem anggaran yang efektif sebagai alat bantu manajemen dalam mengevaluasi dan untuk meningkatkan kinerja manajerial.